Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.08, No. 3 (September, 2026), hlm. 388-399
E-ISSN: 2684-8104 P-2775-9148DOI: https://doi.org/10.20527

Tantangan Implementasi Rencana Aksi *Integrated Area Development (IAD)* Perhutanan Sosial di Kabupaten Kotabaru

Hafizianor[1], Baharuddin[2], Ismar Hamid[3], Susilawati[4], Rizky Ircham Muzaki[5], Ahmad Ramadhan[6], Fajar Baihakki[7]

[1] Universitas Lambung Mangkurat; hafizianor@ulm.ac.id
[2] Universitas Lambung Mangkurat; baharuddin@ulm.ac.id
[3] Universitas Lambung Mangkurat; ismar.hamid@ulm.ac.id
[4] Universitas Lambung Mangkurat; susilawati@ulm.ac.id
[5] Universitas Lambung Mangkurat; Irhammuzaki8@gmail.com
[6] Universitas Lambung Mangkurat; fgadhan@gmail.com
[7] Universitas Lambung Mangkurat; fajar.bai31@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Social Forestry;
Integrated Area Development (IAD);
Pentagonal Asset

Article history:

Received 2026-06-29
Revised 2026-08-04
Accepted 2026-08-06

ABSTRACT

Kotabaru Regency in South Kalimantan Province possesses substantial natural resource potential in rural areas surrounding forest zones, which has the potential to support sustainable regional development. However, the optimal utilization of these resources still faces various challenges, including limited infrastructure, poor connectivity, weak institutional capacity, and ineffective governance. In response to these conditions, the government has implemented a social forestry program reinforced through a business-cluster-based Integrated Area Development (IAD) approach. This study aims to analyze the current state of social forestry enterprises within the core clusters of the Integrated Area Development (IAD) program in Kotabaru Regency using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis. The analysis was conducted using a pentagonal asset framework encompassing natural capital, human capital, social capital, economic capital, and infrastructure capital. Research findings indicate that natural capital is relatively sound and has the potential to support the development of agroforestry, non-timber forest products, and ecosystem services. However, its utilization remains suboptimal due to limited human resource capacity, restricted access to financing, inadequate production and distribution infrastructure, and weak institutional frameworks. Therefore, the development of Integrated Area Development (IAD) must prioritize institutional capacity building, business diversification, improved access to capital, and integrated infrastructure development as key strategies to support the sustainable development of social forestry.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Ismar Hamid
Universitas Lambung Mangkurat; ismar.hamid@ulm.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Perhutanan Sosial;
Integrated Area Development (IAD);
Pentagonal Aset.

Riwayat artikel:

Diterima 29 Juni 2026
Direvisi 04 Agustus 2026
Diterima 06 Agustus 2026

ABSTRAK

Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang substansial di wilayah perdesaan sekitar kawasan hutan, yang berpotensi mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan. Namun, optimalisasi pemanfaatan sumber daya tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta tata kelola yang belum efektif. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengimplementasikan program perhutanan sosial yang diperkuat melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) berbasis klaster usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting usaha perhutanan soaial pada klaster inti Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Kotabaru dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka pentagonal aset yang mencakup modal alam, modal sumber daya manusia, modal sosial, modal ekonomi, dan modal infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal alam relatif baik dan berpotensi mendukung pengembangan agroforestri, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Namun, pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan yang terbatas, infrastruktur produksi dan distribusi yang belum memadai, serta kelembagaan yang belum kuat. Oleh karena itu, pengembangan Integrated Area Development (IAD) perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, diversifikasi usaha, peningkatan akses permodalan, dan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi menjadi strategi prioritas dalam mendukung pengembangan perhutanan sosial secara berkelanjutan.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.

Penulis Korespondensi:

Ismar Hamid
Universitas Lambung Mangkurat; ismar.hamid@ulm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mencakup sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, hingga pariwisata. Potensi tersebut seharusnya menjadi modal utama dalam mendorong pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Kotabaru masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, belum

optimalnya konektivitas antarwilayah, serta lemahnya tata kelola pengelolaan sumber daya yang terintegrasi.

Tantangan tersebut semakin kompleks di wilayah perdesaan, mengingat sebagian besar desa berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan, baik yang telah dibebani izin maupun yang belum. Di sisi lain, masyarakat setempat telah lama menggantungkan kehidupan dan aktivitas ekonominya pada sumber daya hutan, jauh sebelum adanya penetapan kawasan hutan secara legal formal oleh negara. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kelestarian, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat secara legal dan inklusif.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan solusi melalui skema perhutanan sosial, yang memungkinkan masyarakat mengelola kawasan hutan secara legal sebagai instrumen kebijakan yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Meskipun demikian, implementasi perhutanan sosial di tingkat tapak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penguasaan teknologi, serta lemahnya jejaring pasar. Selain itu, pengembangan usaha perhutanan sosial sering kali berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam skala wilayah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkan pendekatan Integrated Area Development (IAD) atau pembangunan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial. Pendekatan ini menekankan integrasi antarwilayah, peningkatan skala ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, serta penguatan klaster usaha berbasis potensi dan kearifan lokal.

Pada tahun 2024–2025, Kabupaten Kotabaru telah menyusun Masterplan IAD Perhutanan Sosial dengan tema “Setulus Bumi Saijaan” yang menegaskan spirit membangun kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial secara adil, lestari, dan inklusif. Masterplan ini menetapkan arah pengembangan perhutanan sosial pada tiga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan fokus pada pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan, agroforestri (silvofishery, apisilvikultur, silvopastura, dan agrisilvikultur), serta hasil hutan bukan kayu (HHBK). Lebih lanjut, masterplan juga telah menetapkan klaster inti pengembangan yang meliputi ekowisata/jasa lingkungan, agroforestri dan HHBK sebagai arah pengembangan utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting usaha perhutanan sosial pada klaster inti pengembangan Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Kotabaru. Analisis ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi IAD

Perhutanan Sosial yang berorientasi pada pemecahan permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing usaha perhutanan sosial.

Hasil analisis diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan rencana aksi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing, guna mendorong pengembangan perhutanan sosial yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai ekonomi tinggi di Kabupaten Kotabaru.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis kondisi eksisting usaha perhutanan sosial pada klaster inti pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Kotabaru. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai potensi, permasalahan, serta tantangan. Penelitian dilaksanakan pada unit-unit usaha perhutanan sosial yang tergabung dalam klaster inti IAD Perhutanan Sosial, yaitu HKm Parapahing Bersatu Jaya, LPHD Cantung Kanan, LPHD Laburan, LPHD Kanibungan, Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung, LPHD Batuah, KTH Batuah Jaya, dan KTH Temputuk Cipta Sejahtera. Unit-unit tersebut mewakili ragam skema perhutanan sosial dan bidang usaha utama, meliputi agroforestri, hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta jasa lingkungan (ekowisata).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi biofisik kawasan, aktivitas usaha, serta infrastruktur penunjang. Wawancara dilakukan dengan pengelola dan anggota kelompok perhutanan sosial guna memperoleh informasi terkait praktik pengelolaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dinamika sosial ekonomi. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen perizinan dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan pendekatan pentagonal aset, yang mencakup modal alam, modal sumber daya manusia, modal sosial, modal ekonomi, dan modal infrastruktur. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing unit usaha perhutanan sosial sebagai dasar perumusan rencana aksi IAD Perhutanan Sosial yang adaptif dan berbasis kebutuhan lapangan.

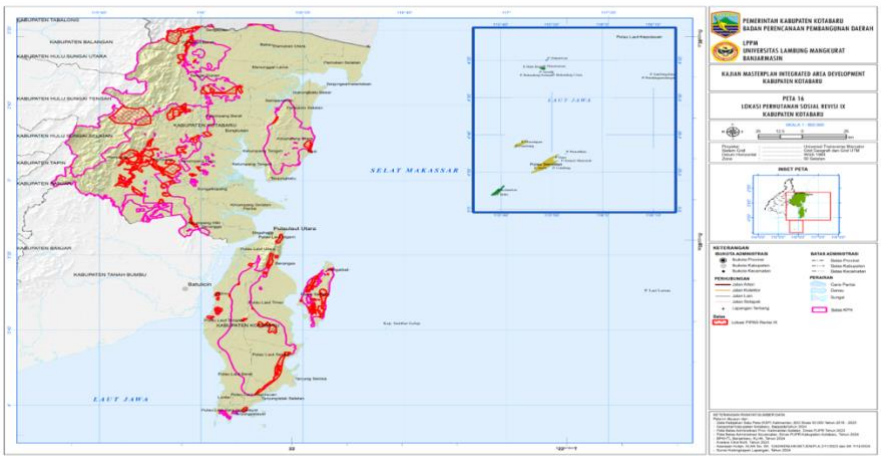

Gambar 1. Peta Lokasi Perhutanan Sosial Kabupaten Kotabaru

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting usaha perhutanan sosial pada klaster inti IAD Perhutanan Sosial di Kabupaten Kotabaru sangat beragam. Perbedaan tersebut terlihat pada tingkat produktivitas usaha, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan aset pendukung, yang dipengaruhi oleh karakteristik biofisik kawasan, pengalaman masyarakat, dan akses terhadap pendampingan serta jejaring usaha.

3.1. Modal Alam

Modal alam merupakan komponen krusial dalam keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial karena mencakup semua sumber daya biofisik yang menopang fungsi ekologis sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan hutan. Hutan yang sehat dan berfungsi secara ekologis mampu menyediakan jasa lingkungan penting seperti pengaturan tata air, pencegahan erosi, penyediaan bahan baku, serta keanekaragaman hayati yang menjadi basis penghidupan masyarakat setempat (Jamika et al., 2023; Astaman et al., 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar unit perhutanan sosial pada klaster inti IAD Perhutanan Sosial di Kabupaten Kotabaru memiliki modal alam yang relatif baik, ditandai oleh tutupan vegetasi alami yang masih cukup luas, adanya sumber mata air, serta aliran sungai yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat dan fungsi ekosistem lainnya. Keberadaan vegetasi hutan yang relatif lestari berperan sebagai sumber jasa lingkungan yang berkelanjutan sekaligus berpotensi mendukung usaha berbasis agroforestri dan hasil hutan bukan kayu, sesuai dengan temuan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan merupakan salah satu kekuatan utama dalam pengelolaan kawasan hutan masyarakat (Sahrullah, 2025).

Namun demikian, disparitas kualitas modal alam antar unit tetap tampak. Pada LPHD Cantung Kanan terlihat adanya perubahan tutupan hutan akibat dominasi tanaman monokultur kelapa sawit, yang cenderung menurunkan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis kawasan. Pola monokultur seperti ini berpotensi mengurangi kapasitas ekosistem dalam menyediakan jasa lingkungan secara optimal serta meningkatkan risiko degradasi tanah dan kehilangan fungsi hidrologis, sebagaimana dijelaskan dalam literatur tentang tantangan utama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Jamika et al., 2023). Selain itu, hampir seluruh unit perhutanan sosial belum memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara berkelanjutan dan dipasarkan secara berkelanjutan. Pemanfaatan modal alam masih bersifat subsisten, dan dalam beberapa kasus praktik pertanian yang berlangsung pada lahan miring berpotensi meningkatkan risiko erosi dan longsor bila tanpa disertai teknik konservasi tanah yang memadai. Hal ini menjadi tantangan penting dalam pengelolaan hutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara simultan, sebagaimana juga diidentifikasi dalam studi tentang hubungan modal sumber daya alam dengan ketahanan penghidupan masyarakat di kawasan perhutanan sosial (Astaman et al., 2024).

Dengan demikian, modal alam yang relatif baik perlu dikelola secara lebih strategis dan sistematik agar dapat mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan, termasuk penguatan sistem agroforestri, diversifikasi komoditas unggulan, dan konservasi lanskap untuk meminimalkan tekanan ekologis. Pemanfaatan modal alam dalam kerangka pengembangan *Integrated Area Development* dapat menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang tidak hanya mempertahankan fungsi ekologis tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat secara inklusif.

3.2 Modal Sumber Daya Manusia

Modal sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial karena menentukan kemampuan kelompok dalam menjalankan fungsi kelembagaan, mengelola usaha, serta mengadaptasi praktik pengelolaan hutan secara berkelanjutan. SDM yang memadai tidak hanya ditandai oleh pengalaman teknis di tingkat tapak, tetapi juga oleh kapasitas manajerial, administrasi, dan kewirausahaan yang mendukung keberlanjutan usaha perhutanan sosial (Mustikaningrum et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pengelola perhutanan sosial pada klaster inti *Integrated Area Development* (IAD) di Kabupaten Kotabaru umumnya memiliki pengalaman panjang dalam bidang pertanian dan pemanfaatan hasil hutan secara tradisional. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam pengelolaan agroforestri dan

hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya pada LPHD Laburan, LPHD Batuah, KTH Batuah Jaya, dan Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung. Pengetahuan lokal dan pengalaman empiris tersebut berperan sebagai basis awal dalam pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi perhutanan sosial di Indonesia (Pujo et al., 2018; Astaman et al., 2024).

Namun demikian, pengalaman teknis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas SDM dalam aspek pengelolaan kelembagaan dan usaha. Hampir seluruh unit perhutanan sosial masih menghadapi keterbatasan dalam administrasi organisasi, perencanaan usaha, manajemen keuangan, serta pemasaran produk. Keterbatasan ini berkorelasi dengan tingkat pendidikan pengelola yang sebagian besar didominasi lulusan SLTP atau sederajat, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengakses informasi, mengelola dokumen kelembagaan, serta membangun jejaring usaha yang lebih luas. Kondisi serupa juga dilaporkan dalam penelitian lain yang menyebutkan bahwa rendahnya kapasitas manajerial SDM merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan usaha perhutanan sosial (Supriatna et al., 2024; Rachmina et al., 2024).

Keterbatasan kapasitas SDM tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan kelompok dalam melakukan diversifikasi usaha dan meningkatkan nilai tambah produk. Hal ini terlihat pada LPHD Kanibungan dan LPHD Cantung Kanan, yang belum mampu mengembangkan usaha perhutanan sosial secara optimal meskipun memiliki akses legal terhadap kawasan hutan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi sangat bergantung pada kualitas SDM dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif (Mustikaningrum et al., 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan modal sumber daya manusia merupakan kebutuhan mendasar dalam pengembangan klaster inti IAD Perhutanan Sosial di Kabupaten Kotabaru. Upaya peningkatan kapasitas perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kemampuan manajemen usaha dan pemasaran, serta pengembangan keterampilan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi strategi penting untuk meningkatkan peran SDM sebagai penggerak utama dalam pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan dan berdaya saing.

3.3.Modal Sosial

Modal sosial menunjukkan variasi yang signifikan antar unit usaha. Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung, HKm Parapahing Bersatu Jaya, LPHD Batuah, dan KTH Batuah Jaya

memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, hubungan antar anggota kelompok harmonis, semangat gotong royong yang tinggi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan usaha perhutanan sosial. Keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, aturan bersama, dan partisipasi aktif anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan temuan (Isnain et al., 2024), yang menyatakan bahwa "modal sosial yang tercermin melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kolektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta peningkatan partisipasi anggota kelompok."

Sebaliknya, LPHD Cantung Kanan, LPHD Laburan, dan LPHD Kanibungan menunjukkan lemahnya visi kolektif, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya jejaring sosial dengan pihak eksternal. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan perhutanan sosial cenderung pasif dan kurang berkembang. Penguatan modal sosial menjadi aspek strategis dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha perhutanan sosial. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Ido, 2019), yang menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan sosial dan lemahnya jaringan eksternal (bridging social capital) dapat menghambat aksi kolektif dan menurunkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya bersama. Oleh karena itu, penguatan modal sosial menjadi aspek strategis dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha perhutanan sosial.

3.4.Modal Ekonomi

Modal ekonomi dalam konteks perhutanan sosial mencerminkan kapasitas unit usaha dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat pada sebagian besar unit perhutanan sosial masih bergantung pada kegiatan agroforestri dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama melalui budidaya padi dan jagung sebagai sumber pangan utama yang sekaligus berfungsi menekan pengeluaran rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan temuan nasional bahwa integrasi tanaman pangan dalam sistem agroforestri dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2025). Diversifikasi usaha menjadi aspek penting untuk memperluas basis ekonomi masyarakat perhutanan sosial. Unit usaha seperti Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung, LPHD Batuah, dan KTH Batuah Jaya menunjukkan perkembangan diversifikasi melalui kombinasi agroforestri, HHBK, dan jasa lingkungan. Pendekatan semacam ini memungkinkan pengelolaan sumber daya hutan yang lebih beragam, sehingga dapat

meminimalkan risiko ketergantungan pada satu komoditas dan meningkatkan ketahanan ekonomi komunitas (Jihan & Sarjan, 2025).

Hasil hutan bukan kayu (NTFP/HHBK) terbukti memiliki peranan yang signifikan terhadap pemasukan rumah tangga di berbagai konteks perhutanan sosial di Indonesia. Studi empiris pada HKm di Aceh Utara menunjukkan bahwa pemanfaatan HHBK dapat memberikan kontribusi pendapatan substansial bagi masyarakat lokal, bahkan mencapai sebagian besar pendapatan total kelompok (Arlita et al., 2023). Lebih jauh, kontribusi ekonomis HHBK juga diidentifikasi sebagai sumber penghasilan penting di kawasan hutan masyarakat lainnya, termasuk buah-buahan dan komoditas non-kayu yang mendukung struktur ekonomi lokal (Ine et al., 2022).

Terlepas dari potensi diversifikasi ini, keterbatasan`akses permodalan tetap menjadi kendala utama pada hampir seluruh unit perhutanan sosial, baik untuk menopang operasional kelembagaan maupun pengembangan usaha. Keterbatasan modal finansial ini berdampak pada hambatan dalam pengadaan sarana produksi, akses pasar, serta investasi dalam hilirisasi produk (Jihan & Sarjan, 2025). Ketergantungan pada komoditas tunggal, seperti kelapa sawit dan pinang di LPHD Cantung Kanan, juga meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga pasar dan ketidakstabilan eksternal, kondisi yang sering ditemukan di unit perhutanan sosial di berbagai daerah Indonesia (Astaman et al., 2024).

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi berbasis perhutanan sosial harus mencakup penguatan modal finansial, penyediaan akses kredit mikro atau modal kerja, serta penguatan kelembagaan ekonomi komunitas agar usaha dapat berkembang secara lebih berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong integrasi agroforestri dan pengembangan NTFP sebagai bagian dari strategi pengelolaan hutan lestari yang memberikan nilai tambah ekonomi, ekologis, dan sosial (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2024).

3.5. Modal Infrastruktur

Modal infrastruktur merupakan salah satu determinan utama dalam pengembangan usaha perhutanan sosial karena berfungsi sebagai prasyarat bagi efisiensi produksi, peningkatan nilai tambah, serta perluasan akses pasar. Infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan, fasilitas produksi dan pengolahan, serta sarana pendukung jasa lingkungan, berperan penting dalam menghubungkan aktivitas pengelolaan hutan dengan sistem ekonomi wilayah yang lebih luas (FAO, 2023; World Bank, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal infrastruktur menjadi aspek terlemah pada sebagian besar unit perhutanan sosial di klaster inti *Integrated Area Development* (IAD)

Perhutanan Sosial Kabupaten Kotabaru. Kondisi akses jalan yang masih didominasi jalan tanah menyebabkan keterbatasan mobilitas orang dan barang, terutama pada musim hujan, sehingga berdampak pada tingginya biaya transportasi dan rendahnya efisiensi distribusi hasil usaha. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menyebutkan bahwa keterbatasan infrastruktur fisik merupakan salah satu faktor penghambat utama pengembangan perhutanan sosial dan usaha berbasis sumber daya hutan di tingkat tapak (Maryudi *et al*., 2023; KLHK, 2024).

Selain aksesibilitas, keterbatasan fasilitas produksi dan pengolahan hasil juga menjadi kendala signifikan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial. Minimnya sarana pascapanen dan pengolahan menyebabkan produk agroforestri dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah ekonomi yang diterima masyarakat relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai penunjang fisik, tetapi juga sebagai faktor strategis dalam proses hilirisasi produk dan peningkatan daya saing usaha perhutanan sosial.

Infrastruktur pendukung jasa lingkungan, khususnya ekowisata, juga masih terbatas pada sebagian besar unit usaha. Keterbatasan sarana seperti jalur interpretasi, fasilitas pendukung pengunjung, dan prasarana keselamatan membatasi potensi pengembangan jasa lingkungan sebagai sumber pendapatan alternatif. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa ekowisata berbasis perhutanan sosial memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong konservasi hutan apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pengelolaan yang terencana (Supriatna et al., 2024).

Gapoktan Hutan Mutiara Sarang Tiung merupakan unit usaha yang relatif lebih maju dari sisi modal infrastruktur, khususnya dalam pengelolaan jasa lingkungan. Ketersediaan sarana dasar pendukung ekowisata memberikan peluang bagi pengembangan usaha non-ekstraktif yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, unit usaha ini masih menghadapi keterbatasan pada infrastruktur distribusi hasil agroforestri dan fasilitas pengolahan produk, sehingga penguatan infrastruktur hilir tetap diperlukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan nilai tambah ekonomi secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penguatan modal infrastruktur merupakan kebutuhan strategis dalam pengembangan klaster inti IAD Perhutanan Sosial di Kabupaten Kotabaru. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, fasilitas pengolahan hasil, serta sarana pendukung jasa lingkungan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha. Pendekatan ini sejalan

dengan kebijakan pembangunan perhutanan sosial yang menekankan pentingnya integrasi antara pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan (KLHK, 2024).

3.6. Implikasi terhadap Rencana Aksi IAD

Berdasarkan analisis pentagonal aset, penyusunan rencana aksi IAD Perhutanan Sosial di Kabupaten Kotabaru perlu diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, penguatan modal sosial dan jejaring kemitraan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penerapan pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN

Analisis kondisi eksisting usaha perhutanan sosial pada klaster inti Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Kotabaru menunjukkan bahwa kapasitas pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh kombinasi modal alam, sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Modal alam pada sebagian besar unit masih berada dalam kondisi relatif baik dan mampu menyediakan jasa lingkungan serta hasil hutan, namun belum dikelola secara optimal melalui sistem agroforestri dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan. Keterbatasan utama terletak pada rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola kelembagaan dan usaha, serta minimnya infrastruktur penunjang produksi, pengolahan, dan distribusi hasil hutan. Modal sosial terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan, di mana unit dengan partisipasi dan kohesi sosial yang kuat menunjukkan kinerja usaha yang lebih adaptif dan produktif. Oleh karena itu, rencana aksi IAD Perhutanan Sosial perlu diarahkan pada penguatan praktik pengelolaan hutan berbasis lanskap, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan pelaku perhutanan sosial, serta pembangunan infrastruktur kehutanan yang mendukung peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Arlita, T., Butar-Butar, I. A., Fikrinda, F., & Muslih, A. M. (2023). Kontribusi Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Kemasyarakatan Rencong di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Hutan Tropis*, *11*(2), 234–239. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20527/jht.v11i2.16772

Astaman, P., Hikmah, A. N., Dassir, M., & Nadirah, S. (2024). Natural Resource Capital for Sustainable Livelihoods in Social Forestry Areas: A Case Study from Enrekang Regency. *Tarjih : Agribusiness Development Journal*, *4*(02), 197–208. https://doi.org/https://doi.org/10.47030/tadj.v4i02.875

Ido, A. (2019). The Effect of Social Capital on Collective Action in Community Forest

Management in Cambodia. *International Journal of the Commons*, *13*(1), 777–803. https://doi.org/https://doi.org/10.18352/ijc.939

Ine, I., Frans, T. M., & Walangitan, H. D. (2022). Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Sekitar Hutan Koha di Kelurahan Wailan, Kota Tomohon. *Silvarum*, *1*(3), 92–94. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/silvarum/article/view/43495/pdf_1

Isnain, M., Rachman, I., & Sudirman, S. (2024). Community Social Capital in Community Forest Management in Poso Pesisir District. *Mitra Sains*, *12*(1), 43–55. https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ms26866579.2024.v12.i1.pp43-55

Jamika, F. I., Amran, A., Umar, I., & Gusman, M. (2023). Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Indonesia. *Pro-Life*, *10*(2), 853–863. https://doi.org/https://doi.org/10.33541/pro-life.v10i2.4814

Jihan, N., & Sarjan, M. (2025). Analisis Strategi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wilayah Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, *3*(1), 12. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/jees.v3i1.947

Kementerian Kehutanan. (2025). *Agroforestry Perhutanan Sosial untuk Mendukung Ketahanan Pangan*. Kementerian Kehutanan. https://www.kehutanan.go.id/news/agroforestry-perhutanan-sosial-untuk-mendukung-ketahanan-pangan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). *Laporan Kinerja/Kebijakan Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). https://www.kehutanan.go.id/s/uploads/Laporan_Kinerja_2024_6224c9bf3d.pdf

Mustikaningrum, D., Lestari, S. E., Prasetyo S, H., Maimunah, & Kristiawan. (2023). Penerapan Sustainable Livelihood Asssessment (SLA) dalam Menyusun Rencana Aksi Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Desa Sidorejo, Kenduruan, Tuban. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, *15*(2), 118–133. https://doi.org/https://doi.org/10.24259/jhm.v12i2.28460

Pujo, P., Sofhani, T. F., Gunawan, B., & Syamsudin, T. S. (2018). Community Capacity Building in Social Forestry Development: A Review. *Journal of Regional and City Planning*, *29*(2), 113–126. https://doi.org/https://doi.org/10.5614/jrcp.2018.29.2.3

Rachmina, D., Herawati, Feryanto, Mahdi, Wibowo, R. P., & Azriani, Z. (2024). Business Sustainability Analysis of the Social Forestry Program in West Sumatra Province. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, *10*(2), 215–235. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/agraris.v10i2.550

Sahrullah. (2025). Strategi Pengelolaan Jasa Lingkungan Hutan Kemasyarakatan Assamaturu Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, *10*(2), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/ag.v10i2.23593

Supriatna, A., Subagja, I. K., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *4*(6), 429–432. https://doi.org/https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i6.817